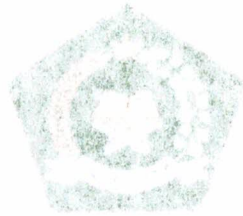




KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

كلمة لاية فرقة
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



REPRODUCTION OF
THESE DOCUMENTS IS PROHIBITED

ALL RIGHTS RESERVED
BY THE NATIONAL ARCHIVES



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan realisasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan selatan pada Tahun 2019. Laporan ini dibuat dengan tujuan sebagai informasi program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019, serta pertanggungjawaban kinerja aparatur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang direncanakan dan diperjanjikan serta juga merupakan sarana informasi dan konsultatif yang diharapkan akan melahirkan alternatif kebijakan ke depan dalam rangka menata dan mengambil keputusan yang baik, tepat, strategis dan pragmatis.

Pada Tahun 2019 tersebut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan perubahan atau revisi terhadap lampiran renstra yaitu pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Dimana pada tahun sebelumnya yang menjadi sasaran strategis berjumlah 16 point, dan seiring berjalannya waktu Tahun 2019 ada perubahan sasaran strategis yaitu menjadi 5 point dan 19 indikator kinerja utama. Perubahan tersebut disebabkan situasi dan kondisi di lapangan pada Kementerian Agama.

Selain itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada segenap aparatur pemerintah terutama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar selalu berupaya se-maksimal mungkin meningkatkan kinerja dan pengabdian, sehingga Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) dapat terlaksana dengan baik, akurat, tepat waktu, efektif dan efisien.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar perencanaan tahun berikutnya. Semoga laporan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan hanya kepada-Nya jualah kita memohon agar kegiatan yang kita lakukan mendapat Ridha dan Barakah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin Ya Rabbal A'alamiin.

Banjarmasin, Februari 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. Noor Fahmi, MM
NIP. 196503011998031002

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Profil SDM Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan	5
E. Sasaran Strategis	17
F. Struktur Susunan Organisasi	17
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran dan Analisis Hasil Capaian Kinerja	29
B. Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV. PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Dokumentasi Tahun 2019	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Pengukuran Kinerja Tahun 2019	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019.....	viii
Tabel 2. Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2019	ix
Tabel 3. Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2019	x
Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Per-Tahun ..	x
Tabel 5. Jumlah Unit Organisasi	6
Tabel 6. Nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan.....	6
Tabel 7. Nama-Nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kalimantan Selatan	7
Tabel 8. Nama-Nama Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kalimantan Selatan	10
Tabel 9. Nama-Nama Madrasah Aliyah Negeri se-Kalimantan Selatan	12
Tabel 10. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama	14
Tabel 11. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 12. Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel 13. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 14. Statistik Pegawai Berdasarkan Usia	16
Tabel 15. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	16
Tabel 16. Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019	27
Tabel 17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kabupaten/ Kota	30
Tabel 18. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	31
Tabel 19. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	37
Tabel 20. Data Rumah Ibadah per-Tanggal 02 Oktober 2019	38
Tabel 21. Data Penyuluh Agama	40
Tabel 22. Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kalimantan Selatan	41

Tabel 23. Data Penghulu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota	46
Tabel 24. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	47
Tabel 25. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	48
Tabel 26. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	56
Tabel 27. Rincian Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019	60
Tabel 28. Laporan Realisasi Anggaran Per-Eselon Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan	62
Tabel 29. Rincian Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2019	63
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan status "sangat baik".

Lebih rincinya capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari 5 (lima) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang digunakan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 1.
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	113,45 %
2.	Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama	98,33 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	120,53 %
4.	Meningkatnya akses layanan pendidikan	144,39 %
5.	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	102,63 %
Jumlah Capaian Kinerja		115,86 %

Berdasarkan dari tabel di atas, capaian kinerja selama 1 (satu) tahun per ruang lingkup satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 mencapai rata-rata sebesar **115,86 %**

Dalam mewujudkan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 didukung dengan DIPA Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pagu Awal Alokasi Anggaran adalah sebesar Rp. 1.305.045.333.000,- (satu triliun tiga ratus lima

miliar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian mengalami revisi penambahan anggaran sehingga menjadi Rp. 1.394.653.181.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Adapun laporan realisasi capaian anggaran tahun 2019 pada 8 ruang lingkup satuan kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2019

No	Ruang Lingkup Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Prosentasi
1.	Sekretaris Jenderal	Rp. 53.974.447.000	Rp. 51.978.428.186	Rp. 1.996.018.814	96.30%
2.	Bimas Islam	Rp. 144.918.006.000	Rp. 135.007.644.795	Rp. 9.910.361.205	93.16 %
3.	Pendidikan Islam	Rp. 1.154.769.812.000	Rp. 1.144.001.743.892	Rp. 10.768.068.108	99.06 %
4.	Bimas Kristen	Rp. 5.050.124.000	Rp. 3.817.384.575	Rp. 1.232.739.425	75.58 %
5.	Bimas Katolik	Rp. 6.208.507.000	Rp. 5.612.682.997	Rp. 595.824.003	90.40 %
6.	Bimas Hindu	Rp. 5.411.822.000	Rp. 4.818.876.653	Rp. 592.945.347	89.04 %
7.	Bimas Buddha	Rp. 3.905.154.000	Rp. 3.849.126.182	Rp. 56.027.818	98.56 %
8.	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 20.415.309.000	Rp. 19.128.004.558	Rp. 1.287.304.442	93.69 %
Jumlah		Rp. 1.394.653.181.000	Rp. 1.368.213.891.838	Rp. 26.439.289.162	91,97 %

Berdasarkan dari tabel di atas, capaian keuangan selama 1 (satu) tahun per ruang lingkup satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 mencapai rata-rata sebesar **91,97 %**.

Adapun Rincian Realisasi antara Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2019

No	Realisasi	Persentase (%)
1.	Realisasi Capaian Kinerja	115,86 %
2.	Realisasi Capaian Keuangan	91,97 %
Jumlah		103,91 %

Sehingga secara keseluruhan capaian sasaran strategis selama 1 (satu) tahun 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan jika digabungkan antara realisasi capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan/anggaran yaitu berjumlah **103,91 %** atau berstatus **"sangat baik"**.

Adapun Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Capaian Keuangan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.
Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Per-Tahun

No.	Realisasi	Persentase Capaian Laporan Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Capaian Kinerja	84,96 %	94,36 %	90,73 %	104,57 %	115,86 %
2.	Capaian Keuangan	86,89 %	90,83 %	86,72 %	91,88 %	91,97 %
Jumlah		85,92 %	92,59 %	88,72 %	98,22 %	103,91 %

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 merupakan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak intern yaitu para pejabat struktural dan fungsional serta karyawan-karyawati Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak eksternal atau Instansi Pemerintah sebagai mitra kerja guna mewujudkan dan mendukung pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 s.d 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu tahapan dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Guna menentukan arah dan fokus sasaran strategis yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, perlu adanya Visi yang merupakan cita-cita atau keinginan yang akan dicapai.

Visi itu harus dapat memberi petunjuk, motivasi terhadap pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, agar mereka dapat memberdayakan dirinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis,

yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta membantu kelancaran pelaksanaan penilaian kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 yang mengganti PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

2. Tugas Pokok

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
- d. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; dan
- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi.

D. Profil SDM Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan didukung oleh 7.555 pegawai (terhitung per 31 Januari 2020) yang tersebar pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 13 buah Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, 151 buah Kantor Urusan Agama (KUA), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) berjumlah 41 buah, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) berjumlah 71

buah, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebanyak 89 buah, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) berjumlah 210 buah, sedangkan Madrasah Ibtidayah Negeri (MiN) berjumlah 143 buah dan pada Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) sebanyak 450 buah. Sehingga secara keseluruhan unit organisasi pada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.
Jumlah Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Jumlah	keterangan
1.	Kanwil Kemenag Prov. Kalsel	1 lembaga	
2.	Kankemenag Kota	2 lembaga	
3.	Kankemenag Kabupaten	11 lembaga	
4.	KUA Kecamatan	151 lembaga	
5.	MAN	41 lembaga	
6.	MAS	71 lembaga	
7.	MTsN	89 lembaga	
8.	MTsS	210 lembaga	
9.	MiN	143 lembaga	
10.	MIS	450 lembaga	
Jumlah		1.169 lembaga	

Tabel. 6
Nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota
Se-Kalimantan Selatan

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
2.	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
3.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar
4.	Kantor Kementerian Agama Tapin
5.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara
8.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan

9.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong
10.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
11.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut
12.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu
13.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru

Tabel. 7
Nama-Nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Se-Kalimantan Selatan

No.	Kota dan Kabupaten	Nama Satuan Kerja
1.	Kota Banjarmasin	1. MIN 1 Kota Banjarmasin 2. MIN 2 Kota Banjarmasin 3. MIN 3 Kota Banjarmasin 4. MIN 4 Kota Banjarmasin 5. MIN 5 Kota Banjarmasin
2.	Kota Banjarbaru	MIN Kota Banjarbaru
3.	Kabupaten Banjar	1. MIN 1 Banjar 2. MIN 2 Banjar 3. MIN 3 Banjar 4. MIN 4 Banjar 5. MIN 5 Banjar 6. MIN 6 Banjar 7. MIN 7 Banjar 8. MIN 8 Banjar 9. MIN 9 Banjar 10. MIN 10 Banjar 11. MIN 11 Banjar 12. MIN 12 Banjar 13. MIN 13 Banjar 14. MIN 14 Banjar 15. MIN 15 Banjar 16. MIN 16 Banjar 17. MIN 17 Banjar 18. MIN 18 Banjar 19. MIN 19 Banjar 20. MIN 20 Banjar
4.	Kabupaten Tapin	1. MIN 1 Tapin 2. MIN 2 Tapin 3. MIN 3 Tapin 4. MIN 4 Tapin 5. MIN 5 Tapin

		6. MIN 6 Tapin 7. MIN 7 Tapin 8. MIN 8 Tapin
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. MIN 1 Hulu Sungai Selatan 2. MIN 2 Hulu Sungai Selatan 3. MIN 3 Hulu Sungai Selatan 4. MIN 4 Hulu Sungai Selatan 5. MIN 5 Hulu Sungai Selatan 6. MIN 6 Hulu Sungai Selatan 7. MIN 7 Hulu Sungai Selatan 8. MIN 8 Hulu Sungai Selatan 9. MIN 9 Hulu Sungai Selatan 10. MIN 10 Hulu Sungai Selatan 11. MIN 11 Hulu Sungai Selatan 12. MIN 12 Hulu Sungai Selatan 13. MIN 13 Hulu Sungai Selatan 14. MIN 14 Hulu Sungai Selatan 15. MIN 15 Hulu Sungai Selatan 16. MIN 16 Hulu Sungai Selatan 17. MIN 17 Hulu Sungai Selatan 18. MIN 18 Hulu Sungai Selatan 19. MIN 19 Hulu Sungai Selatan 20. MIN 20 Hulu Sungai Selatan
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. MIN 1 Hulu Sungai Tengah 2. MIN 2 Hulu Sungai Tengah 3. MIN 3 Hulu Sungai Tengah 4. MIN 4 Hulu Sungai Tengah 5. MIN 5 Hulu Sungai Tengah 6. MIN 6 Hulu Sungai Tengah 7. MIN 7 Hulu Sungai Tengah 8. MIN 8 Hulu Sungai Tengah 9. MIN 9 Hulu Sungai Tengah 10. MIN 10 Hulu Sungai Tengah 11. MIN 11 Hulu Sungai Tengah 12. MIN 12 Hulu Sungai Tengah 13. MIN 13 Hulu Sungai Tengah 14. MIN 14 Hulu Sungai Tengah 15. MIN 15 Hulu Sungai Tengah 16. MIN 16 Hulu Sungai Tengah 17. MIN 17 Hulu Sungai Tengah 18. MIN 18 Hulu Sungai Tengah 19. MIN 19 Hulu Sungai Tengah 20. MIN 20 Hulu Sungai Tengah 21. MIN 21 Hulu Sungai Tengah 22. MIN 22 Hulu Sungai Tengah 23. MIN 23 Hulu Sungai Tengah

		24. MIN 24 Hulu Sungai Tengah 25. MIN 25 Hulu Sungai Tengah 26. MIN 26 Hulu Sungai Tengah 27. MIN 27 Hulu Sungai Tengah 28. MIN 28 Hulu Sungai Tengah
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. MIN 1 Hulu Sungai Utara 2. MIN 2 Hulu Sungai Utara 3. MIN 3 Hulu Sungai Utara 4. MIN 4 Hulu Sungai Utara 5. MIN 5 Hulu Sungai Utara 6. MIN 6 Hulu Sungai Utara 7. MIN 7 Hulu Sungai Utara 8. MIN 8 Hulu Sungai Utara 9. MIN 9 Hulu Sungai Utara 10. MIN 10 Hulu Sungai Utara 11. MIN 11 Hulu Sungai Utara 12. MIN 12 Hulu Sungai Utara 13. MIN 13 Hulu Sungai Utara 14. MIN 14 Hulu Sungai Utara 15. MIN 15 Hulu Sungai Utara 16. MIN 16 Hulu Sungai Utara 17. MIN 17 Hulu Sungai Utara 18. MIN 18 Hulu Sungai Utara 19. MIN 19 Hulu Sungai Utara 20. MIN 20 Hulu Sungai Utara
8.	Kabupaten Balangan	1. MIN 1 Balangan 2. MIN 2 Balangan 3. MIN 3 Balangan 4. MIN 4 Balangan 5. MIN 5 Balangan 6. MIN 6 Balangan 7. MIN 7 Balangan
9.	Kabupaten Tabalong	1. MIN 1 Tabalong 2. MIN 2 Tabalong 3. MIN 3 Tabalong 4. MIN 4 Tabalong 5. MIN 5 Tabalong 6. MIN 6 Tabalong 7. MIN 7 Tabalong 8. MIN 8 Tabalong 9. MIN 9 Tabalong 10. MIN 10 Tabalong 11. MIN 11 Tabalong 12. MIN 12 Tabalong
10.	Kabupaten Barito Kuala	1. MIN 1 Barito Kuala 2. MIN 2 Barito Kuala

		3. MIN 3 Barito Kuala 4. MIN 4 Barito Kuala 5. MIN 5 Barito Kuala 6. MIN 6 Barito Kuala 7. MIN 7 Barito Kuala 8. MIN 8 Barito Kuala 9. MIN 9 Barito Kuala 10. MIN 10 Barito Kuala
11.	Kabupaten Tanah Laut	1. MIN 1 Tanah Laut 2. MIN 2 Tanah Laut 3. MIN 3 Tanah Laut 4. MIN 4 Tanah Laut 5. MIN 5 Tanah Laut
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	MIN Tanah Bumbu
13.	Kabupaten Kotabaru	1. MIN 1 Kotabaru 2. MIN 2 Kotabaru
Jumlah		143 Lembaga

Tabel. 8
Nama-Nama Madrasah Tsanawiyah Negeri
Se-Kalimantan Selatan

No.	Kota dan Kabupaten	Nama Satuan Kerja
1.	Kota Banjarmasin	1. MTsN 1 Kota Banjarmasin 2. MTsN 2 Kota Banjarmasin 3. MTsN 3 Kota Banjarmasin 4. MTsN 4 Kota Banjarmasin
2.	Kota Banjarbaru	-
3.	Kabupaten Banjar	1. MTsN 1 Banjar 2. MTsN 2 Banjar 3. MTsN 3 Banjar 4. MTsN 4 Banjar 5. MTsN 5 Banjar 6. MTsN 6 Banjar 7. MTsN 7 Banjar 8. MTsN 8 Banjar 9. MTsN 9 Banjar
4.	Kabupaten Tapin	1. MTsN 1 Tapin 2. MTsN 2 Tapin 3. MTsN 3 Tapin 4. MTsN 4 Tapin

		5. MTsN 5 Tapin 6. MTsN 6 Tapin
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. MTsN 1 Hulu Sungai Selatan 2. MTsN 2 Hulu Sungai Selatan 3. MTsN 3 Hulu Sungai Selatan 4. MTsN 4 Hulu Sungai Selatan 5. MTsN 5 Hulu Sungai Selatan 6. MTsN 6 Hulu Sungai Selatan 7. MTsN 7 Hulu Sungai Selatan 8. MTsN 8 Hulu Sungai Selatan 9. MTsN 9 Hulu Sungai Selatan 10. MTsN 10 Hulu Sungai Selatan 11. MTsN 11 Hulu Sungai Selatan 12. MTsN 12 Hulu Sungai Selatan
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. MTsN 1 Hulu Sungai Tengah 2. MTsN 2 Hulu Sungai Tengah 3. MTsN 3 Hulu Sungai Tengah 4. MTsN 4 Hulu Sungai Tengah 5. MTsN 5 Hulu Sungai Tengah 6. MTsN 6 Hulu Sungai Tengah 7. MTsN 7 Hulu Sungai Tengah 8. MTsN 8 Hulu Sungai Tengah 9. MTsN 9 Hulu Sungai Tengah 10. MTsN 10 Hulu Sungai Tengah 11. MTsN 11 Hulu Sungai Tengah 12. MTsN 12 Hulu Sungai Tengah 13. MTsN 13 Hulu Sungai Tengah 14. MTsN 14 Hulu Sungai Tengah
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. MTsN 1 Hulu Sungai Utara 2. MTsN 2 Hulu Sungai Utara 3. MTsN 3 Hulu Sungai Utara 4. MTsN 4 Hulu Sungai Utara 5. MTsN 5 Hulu Sungai Utara 6. MTsN 6 Hulu Sungai Utara 7. MTsN 7 Hulu Sungai Utara 8. MTsN 8 Hulu Sungai Utara
8.	Kabupaten Balangan	1. MTsN 1 Balangan 2. MTsN 2 Balangan 3. MTsN 3 Balangan 4. MTsN 4 Balangan 5. MTsN 5 Balangan
9.	Kabupaten Tabalong	1. MTsN 1 Tabalong 2. MTsN 2 Tabalong 3. MTsN 3 Tabalong 4. MTsN 4 Tabalong 5. MTsN 5 Tabalong

		6. MTsN 6 Tabalong 7. MTsN 7 Tabalong 8. MTsN 8 Tabalong 9. MTsN 9 Tabalong 10. MTsN 10 Tabalong 11. MTsN 11 Tabalong 12. MTsN 12 Tabalong
10.	Kabupaten Barito Kuala	1. MTsN 1 Barito Kuala 2. MTsN 2 Barito Kuala 3. MTsN 3 Barito Kuala 4. MTsN 4 Barito Kuala 5. MTsN 5 Barito Kuala 6. MTsN 6 Barito Kuala
11.	Kabupaten Tanah Laut	1. MTsN 1 Tanah Laut 2. MTsN 2 Tanah Laut 3. MTsN 3 Tanah Laut 4. MTsN 4 Tanah Laut 5. MTsN 5 Tanah Laut 6. MTsN 6 Tanah Laut 7. MTsN 7 Tanah Laut 8. MTsN 8 Tanah Laut
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	1. MTsN 1 Tanah Bumbu 2. MTsN 2 Tanah Bumbu 3. MTsN 3 Tanah Bumbu
13.	Kabupaten Kotabaru	1. MTsN 1 Kotabaru 2. MTsN 2 Kotabaru
Jumlah		89 Lembaga

Tabel. 9
Nama-Nama Madrasah Aliyah Negeri
Se-Kalimantan Selatan

No.	Kota dan Kabupaten	Nama Satuan Kerja
1.	Kota Banjarmasin	1. MAN 1 Kota Banjarmasin 2. MAN 2 Kota Banjarmasin 3. MAN 3 Kota Banjarmasin
2.	Kota Banjarbaru	MAN Kota Banjarbaru
3.	Kabupaten Banjar	1. MAN 1 Banjar 2. MAN 2 Banjar 3. MAN 3 Banjar 4. MAN 4 Banjar 5. MAN 5 Banjar

4.	Kabupaten Tapin	1. MAN 1 Tapin 2. MAN 2 Tapin 3. MAN 3 Tapin
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. MAN 1 Hulu Sungai Selatan 2. MAN 2 Hulu Sungai Selatan 3. MAN 3 Hulu Sungai Selatan
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. MAN 1 Hulu Sungai Tengah 2. MAN 2 Hulu Sungai Tengah 3. MAN 3 Hulu Sungai Tengah 4. MAN 4 Hulu Sungai Tengah 5. MAN 5 Hulu Sungai Tengah
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. MAN 1 Hulu Sungai Utara 2. MAN 2 Hulu Sungai Utara 3. MAN 3 Hulu Sungai Utara 4. MAN 4 Hulu Sungai Utara 5. MAN 5 Hulu Sungai Utara
8.	Kabupaten Balangan	1. MAN 1 Balangan 2. MAN 2 Balangan 3. MAN 3 Balangan 4. MAN 4 Balangan
9.	Kabupaten Tabalong	1. MAN 1 Tabalong 2. MAN 2 Tabalong 3. MAN 3 Tabalong 4. MAN 4 Tabalong
10.	Kabupaten Barito Kuala	1. MAN 1 Barito Kuala 2. MAN 2 Barito Kuala 3. MAN 3 Barito Kuala 4. MAN 4 Barito Kuala 5. MAN 5 Barito Kuala
11.	Kabupaten Tanah Laut	MAN Tanah Laut
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	MAN Tanah Bumbu
13.	Kabupaten Kotabaru	MAN Kotabaru
Jumlah		41 Lembaga

Data pegawai diklasifikasikan berdasarkan Agama, Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan, Usia, dan Jenis Jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
Statistik Pegawai Berdasarkan Agama

No.	Unit Kerja	Jumlah	Agama				
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
1.	Kemenag Prov. Kalsel	131	122	3	2	2	2
2.	Kemenag Kota Banjarmasin	778	762	4	8	-	4
3.	Kemenag Kota Banjarbaru	162	155	4	3	-	-
4.	Kemenag Kab. Banjar	946	946	-	-	-	-
5.	Kemenag Kab. Tapin	385	385	-	-	-	-
6.	Kemenag Kab. HSS	989	989	-	-	-	-
7.	Kemenag Kab. HST	990	983	1	-	6	-
8.	Kemenag Kab. HSU	1.032	1.032	-	-	-	-
9.	Kemenag Kab. Balangan	287	281	-	2	1	3
10.	Kemenag Kab. Tabalong	588	579	3	5	1	-
11.	Kemenag Kab. Barito Kuala	542	538	-	-	4	-
12.	Kemenag Kab. Tanah Laut	360	357	-	3	-	-
13.	Kemenag Kab. Tanah Bumbu	154	147	-	2	5	-
14.	Kemenag Kab. Kotabaru	211	204	-	4	1	2
Jumlah		7.556	7.480	15	29	20	11

Tabel 11.
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin		keterangan
			Pria	Wanita	
1.	Kemenag Prov. Kalimantan Selatan	131	78	53	
2.	Kemenag Kota Banjarmasin	778	321	457	
3.	Kemenag Kota Banjarbaru	162	83	79	
4.	Kemenag Kab. Banjar	946	424	522	
5.	Kemenag Kab. Tapin	385	178	207	
6.	Kemenag Kab. Hulu Sungai Selatan	989	373	616	
7.	Kemenag Kab. Hulu Sungai Tengah	990	388	602	
8.	Kemenag Kab. Hulu Sungai Utara	1.032	454	578	
9.	Kemenag Kab. Balangan	287	166	121	
10.	Kemenag Kab. Tabalong	588	248	340	
11.	Kemenag Kab. Barito Kuala	542	288	254	
12.	Kemenag Kab. Tanah Laut	360	161	199	
13.	Kemenag Kab. Tanah Bumbu	154	90	64	
14.	Kemenag Kab. Kotabaru	211	124	87	
Jumlah		7.555	3.376	4.179	

Tabel 12.
Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan						
			SD	SLTP	SLTA	Dplm	S1	S2	S3
1.	Kemenag Prov. Kalsel	131	-	1	18	3	73	35	1
2.	Kemenag Kota Banjarmasin	778	1	2	55	8	611	101	-
3.	Kemenag Kota Banjarbaru	162	-	1	18	2	125	16	-
4.	Kemenag Kab. Banjar	946	1	-	68	31	773	73	-
5.	Kemenag Kab. Tapin	385	9	9	33	8	305	21	-
6.	Kemenag Kab. HSS	989	-	1	84	18	831	48	7
7.	Kemenag Kab. HST	990	5	4	72	158	710	39	2
8.	Kemenag Kab. HSU	1.032	1	1	46	34	867	80	3
9.	Kemenag Kab. Balangan	287	-	3	18	8	243	15	-
10.	Kemenag Kab. Tabalong	588	2	-	56	4	518	8	-
11.	Kemenag Kab. Barito Kuala	542	4	7	60	16	416	39	-
12.	Kemenag Kab. Tanah Laut	360	1	-	21	12	303	23	-
13.	Kemenag Kab. Tanah Bumbu	154	-	-	13	4	123	13	1
14.	Kemenag Kab. Kotabaru	211	1	4	19	7	171	8	1
Jumlah		7.555	25	33	581	313	6.069	519	15

Tabel 13.
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	Kemenag Prov. Kalsel	131	-	9	94	28
2.	Kemenag Kota Banjarmasin	778	-	31	511	236
3.	Kemenag Kota Banjarbaru	162	-	9	125	28
4.	Kemenag Kab. Banjar	946	1	59	684	202
5.	Kemenag Kab. Tapin	385	16	37	264	68
6.	Kemenag Kab. Hulu Sungai Selatan	989	-	64	742	183
7.	Kemenag Kab. Hulu Sungai Tengah	990	2	44	804	140
8.	Kemenag Kab. Hulu Sungai Utara	1.032	-	42	774	216
9.	Kemenag Kab. Balangan	287	1	23	231	32
10.	Kemenag Kab. Tabalong	588	2	38	452	96
11.	Kemenag Kab. Barito Kuala	542	12	58	370	102
12.	Kemenag Kab. Tanah Laut	360	1	16	260	83
13.	Kemenag Kab. Tanah Bumbu	154	-	12	124	18
14.	Kemenag Kab. Kotabaru	211	4	16	149	42
Jumlah		7.555	39	458	5.584	1.474

Tabel 14.
Statistik Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Unit Kerja	Jumlah	Usia				
			24-29	30-39	40-49	50-57	57>
1.	Kemenag Prov. Kalsel	131	3	33	40	51	4
2.	Kemenag Kota Banjarmasin	778	35	91	340	275	37
3.	Kemenag Kota Banjarbaru	162	-	28	81	49	4
4.	Kemenag Kab. Banjar	946	39	126	438	302	41
5.	Kemenag Kab. Tapin	385	2	33	230	116	4
6.	Kemenag Kab. HSS	989	35	168	497	267	22
7.	Kemenag Kab. HST	990	44	195	491	249	11
8.	Kemenag Kab. HSU	1.032	32	254	451	270	25
9.	Kemenag Kab. Balangan	287	8	71	127	78	3
10.	Kemenag Kab. Tabalong	588	28	106	282	152	20
11.	Kemenag Kab. Barito Kuala	542	20	81	269	157	15
12.	Kemenag Kab. Tanah Laut	360	14	60	177	100	9
13.	Kemenag Kab. Tanah Bumbu	154	4	39	72	36	3
14.	Kemenag Kab. Kotabaru	211	11	30	100	67	3
Jumlah		7.555	275	1.315	3.595	2.170	201

Tabel 15.
Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural	262 Orang	
2.	Pelaksana	1.174 Orang	
3.	Guru	5.551 Orang	
4.	Pengawas	151 Orang	
5.	Penyuluh	181 Orang	
6.	Penghulu	185 Orang	
7.	Analisis Kepegawaian	8 Orang	
8.	Analisis Kebijakan	4 Orang	
9.	Arsiparis	15 Orang	
10.	Perencana	2 Orang	
11.	Pranata Komputer	12 Orang	
12.	Pranata Humas	5 Orang	
13.	Pustakawan	1 Orang	
14.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang	
Jumlah		7.555 orang	

E. Sasaran Strategis

Bidang Agama:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama
2. Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan

Bidang Pendidikan:

1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
2. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

F. Struktur Susunan Organisasi

Struktur Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 pengganti Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas :
 - a. Bagian Tata Usaha
 - b. Bidang Pendidikan Madrasah
 - c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
 - d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - e. Bidang Urusan Agama Islam

- f. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 - g. Pembimbing Masyarakat Kristen
 - h. Pembimbing Masyarakat Katolik
 - i. Pembimbing Masyarakat Hindu
 - j. Pembimbing Masyarakat Buddha
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan membawahi Kantor Kementerian Agama :
- 1. Kabupaten Tanah Laut;
 - 2. Kabupaten Banjar;
 - 3. Kabupaten Barito Kuala;
 - 4. Kabupaten Tapin;
 - 5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 8. Kota Banjarmasin;
 - 9. Kabupaten Tabalong;
 - 10. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 11. Kota Banjarbaru;
 - 12. Kabupaten Kotabaru; dan
 - 13. Kabupaten Balangan.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari manajemen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, tiap-tiap Subbagian, Bidang dan Pembimbing Masyarakat (Bimas) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara
- c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum
- d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana dan KUB
- e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana
- c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
- d. Seksi Guru
- e. Seksi Tenaga Kependidikan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
- b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah
- c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Qur'an

- d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
 - e. Seksi Pondok Pesantren Ma'had Aly
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari :
- a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler
 - b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji
 - c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus
 - d. Seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler
 - e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Urusan Agama Islam terdiri dari :
- a. Seksi Kemesjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah
 - b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam
 - c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah
 - d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri dari :
- a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi
 - b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam

- c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits
 - d. Seksi Pemberdayaan Zakat
 - e. Seksi Pemberdayaan Wakaf
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pembimbing Masyarakat Kristen
 8. Pembimbing Masyarakat Katolik
 9. Pembimbing Masyarakat Hindu
 10. Pembimbing Masyarakat Buddha

Sedangkan susunan organisasi Kantor Kementerian Agama se-Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2019 terdiri dari :

Pasal 550

Ayat (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Banjarmasin terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
- h. Penyelenggara Kristen; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
- g. Penyelenggara Katolik; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;
- c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
- g. Penyelenggara Buddha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sasaran strategis, susunan struktur organisasi, dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja : berisi Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja : menguraikan hasil pengukuran kinerja kegiatan, analisis capaian kinerja dan pengukuran kinerja pada aspek keuangan.

Bab IV Penutup : Kesimpulan yang berkaitan dengan capaian sasaran kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka dibuatlah perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 disusun dalam bentuk Penetapan Kinerja berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pagu awal pada DIPA

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 1.305.045.333.000,- (satu triliun tiga ratus lima miliar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang akan mendukung pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019.

Dalam rencana strategis Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah membuat revisi Renstra 2015-2019, sehingga merumuskan 5 (lima) sasaran strategis yaitu sebagai berikut, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama; (2) Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama; (3) Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan; (4) Meningkatnya akses layanan pendidikan; (5) Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipergunakan dalam mengidentifikasi keberhasilan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun keterkaitan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disepakati / diperjanjikan, sebagai berikut :

Tabel 16.
Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	1. Jumlah umat beragama yang aktif pada Rumah Ibadah 2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	3.000.000 orang 3.200 buah
Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama	1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi	- 75,00%
Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar 2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi 3. Jumlah KUA yang memenuhi standar 4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi 5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi	39 buah 94 orang 3 buah 159 85,00%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akses layanan pendidikan	1. APK RA 2. APK MI/Ula 3. APM MI/Ula 4. APK MTs/Wustha 5. APM MTs/Wustha 6. APK MA/Uiya 7. APM MA/Ulya	8,66 % 13,54 % 11,15 % 22,50 % 18,36 % 9,41 % 6,98 %
Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	1. Rerata nilai ujian sekolah MTs 2. Rerata nilai ujian sekolah MA 3. Indeks Integritas Siswa	50,00 55,00 85,00 %

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran dan Analisis Hasil Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), dengan output yang dihasilkan melalui pelaksanaan Program/kegiatan yang akan mendukung capaian program/outcome Kementerian Agama RI.

Akuntabilitas Pengukuran Hasil kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang akan digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja

dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis Bidang Agama

1. Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

Berdasarkan data yang bersumber dari Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, per-bulan Februari 2020, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih berjumlah 4.054.313 juta jiwa, dengan penduduk Muslimnya berjumlah 3.933.064 jiwa, agama Kristen berjumlah 54.020 jiwa, agama Katolik sebesar 21.627 jiwa, agama Hindu berjumlah 23.522 jiwa, agama Buddha berjumlah 12.433 jiwa dan Konghucu sebesar 233 jiwa, serta Aliran Kepercayaan sebesar 9.414 jiwa, lebih rincinya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kabupaten/Kota

No	Nama	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kong hucu	Aliran Kepercayaan	Jumlah
1	Tanah Laut	341.987	3.711	1.508	1.470	234	1	3	348.914
2	Kotabaru	298.503	10.951	3.599	1.939	2.486	82	6.439	323.999
3	Banjar	548.317	1.449	637	1.743	368	17	96	552.627
4	Barito Kuala	313.094	1.249	495	1.355	69	0	2	316.264
5	Tapin	186.159	1.257	140	307	0	88	311	188.262
6	Hulu Sungai Selatan	228.113	1.259	21	400	19	0	1.871	231.683
7	Hulu Sungai Tengah	253.022	916	40	4.806	122	2	337	259.245

8	Hulu Sungai Utara	230.275	80	29	17	8	0	1	230.410
9	Tabalong	233.629	6.720	2.211	1.169	26	0	8	243.763
10	Tanah Bumbu	304.692	4.459	3.026	7.793	116	29	337	320.452
11	Baiaingan	123.965	677	272	1.901	4.199	0	0	131.234
12	Banjarmasin	643.716	13.996	7.437	279	4.567	14	6	670.015
13	Banjarbaru	227.572	7.096	2.212	343	219	0	3	237.445
Jumlah Total		3.933.064	54.020	21.627	23.522	12.433	233	9.414	4.054.313
Jumlah Persentase (%)		97,01 %	1,33 %	0,53 %	0,58 %	0,31 %	0,01%	0,23 %	

Sumber : Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian sasaran strategis pertama, yaitu : Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama dengan 2 (dua) indikator, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 18.

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

Sasaran Strategis 1.			
Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Jumlah umat beragama yang aktif pada Rumah Ibadah	3.000.000	2.443.210	81,44 %
2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	3.200	4.655	145,46 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.			113,45 %

Berdasarkan perhitungan target - realisasi terhadap pelaksanaan capaian Sasaran Strategis 1 dengan capaian Outcome dapat dinilai “sangat baik” yaitu berjumlah 113,45 %.

2. Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama.

1. Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama:

Konflik sosial sebetulnya merupakan gejala yang universal, artinya suatu peristiwa yang dapat dijumpai dan terjadi di dalam setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Konflik sosial dapat terjadi dalam lingkup kecil, menengah dan besar seperti pada organisasi, keluarga, komunitas, masyarakat, negara dan dunia, dapat melibatkan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, komunitas dengan komunitas, atau bangsa dengan bangsa.

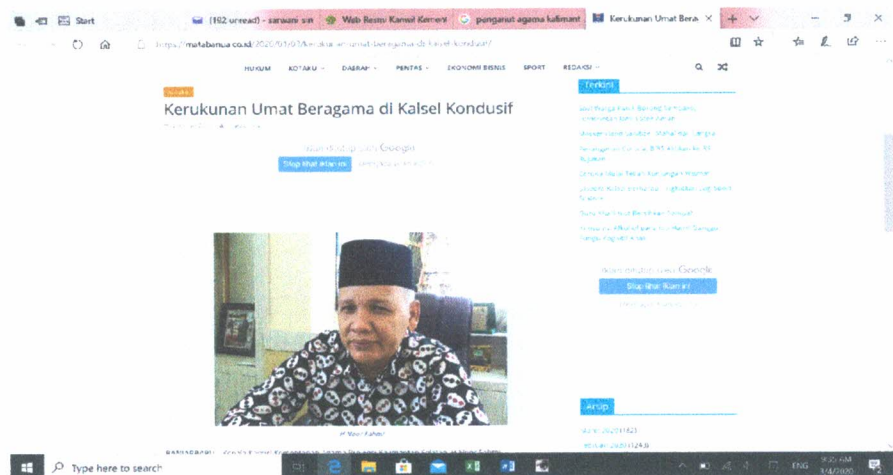


Foto: 1.

Sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir, kehidupan beragama di Provinsi Kalimantan Selatan sangat kondusif dan merupakan salah satu daerah teraman di Indonesia dari segala bentuk tindakan anarkis maupun bahaya lainnya. Kerukunan hidup beragama di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi contoh provinsi

lain karena masyarakatnya menjaga dan saling menghormati antar pemeluk agama. Saat ini masalah konflik kerukunan umat di Kalimantan Selatan tergolong minim. Sehingga indikator kinerja tentang jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama untuk tahun 2019 tidak ada target dalam arti tidak ada yang ditargetkan dan realisasinya pun juga tidak ada.

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi:

Kementerian Agama (Kemenag) RI merilis survei indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Merujuk pada angka KUB nasional 73,83 terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Survei indeks KUB itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama.



Foto: 2.

Dalam survei tersebut terdapat beberapa faktor penentu indeks, yang berisi korelasi hubungan antara pendidikan, pendapatan, dan peran Kementerian Agama terhadap sikap rukun di Indonesia pada 2019, seperti:

- 1) pendidikan keluarga (korelasi 0.176, skor 81.12),
- 2) implementasi kearifan lokal (korelasi 0.228, skor 46.99),
- 3) pendapatan rumah tangga (korelasi 0.052, skor 2510337.76),
- 4) heterogenitas agama (korelasi -0.003, skor 86.45), dan
- 5) peran kementerian (korelasi 0.061, skor 7.93).

Pelaksanaan survei dilaksanakan pada 16 Mei-19 Mei 2019 dan 18-24 Juni 2019. Terdapat jumlah responden 13.600 orang dari 136 Kota dan Kabupaten yang tersebar di 34 Provinsi. Metode survei menggunakan penarikan sampel secara acak berjenjang dan *margin of error* kurang lebih 4,8 persen. Ada 3 hal yang disoroti dalam survei yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama di antara umat beragama.

Skors Indeks KUB di atas rata-rata nasional:

- 1). Papua Barat: 82,1
- 2). Nusa Tenggara Timur: 81,1
- 3). Bali: 80,1
- 4). Sulawesi Utara: 79,9
- 5). Maluku: 79,4
- 6). Papua: 79,0
- 7). Kalimantan Utara: 78,0

8). Kalimantan Tengah: 77,8

9). Kalimantan Barat: 76,7

10). Sumatera Utara: 76,3

11). Sulawesi Selatan: 75,7

12). Sulawesi Tengah: 75,0

13). Jawa Tengah: 74,6

14). DI Yogyakarta: 74,2

15). Sulawesi Barat: 74,1

16). Sulawesi Tenggara: 73,9

Skors Indeks KUB di bawah rata-rata nasional:

17). Jawa Timur: 73,7

18). Kalimantan Timur: 73,6

19). Gorontalo: 73,2

20). Kepulauan Bangka Belitung: 73,1

21). Lampung: 73,1

22). Kepulauan Riau: 72,8

23). Maluku Utara: 72,7

24). Kalimantan Selatan: 72,5

25). Sumatera Selatan: 72,4

26). Bengkulu: 71,8

27). DKI Jakarta: 71,3

28). Jambi: 70,7

29). Nusa Tenggara Barat: 70,4

- 30). Riau: 69,3
- 31). Banten: 68,9
- 32). Jawa Barat: 68,5
- 33). Sumatera Barat: 64,4
- 34). Aceh: 60,2

Survei Kemenag memberikan kesimpulan bahwa dengan melihat kategorisasi dan hasil indeks, maka dapat disimpulkan bahwa semua provinsi memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi dan sangat tinggi.

Pemerintah Provinsi dan khususnya Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, insan jurnalis, serta unsur pemuda. Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan.

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik. Karenanya keberadaan FKUB terus dipertahankan dan diberdayakan untuk membantu pemerintah dalam memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Sampai saat ini

FKUB telah terbentuk pada 13 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi baru 5 buah FKUB yang sudah memiliki gedung Sekretariat Bersama sehingga ada 8 buah FKUB lagi yang belum memiliki gedung ini dikarenakan adanya moratorium.

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian sasaran strategis kedua, yaitu : Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama dengan 2 (dua) indikator, digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 19.

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

Sasaran Strategis 2.			
Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	-	-	100 %
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi	75,00 %	72,50 %	96,66 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.			98,33 %

Berdasarkan perhitungan target - realisasi terhadap pelaksanaan capaian Sasaran Strategis 2 dengan capaian Outcome dapat dinilai "sangat baik" yaitu berjumlah 98,33 %.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan.

1. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar:

Salah satu kebijakan utama pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulasi bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasional rumah ibadah. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah yang diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.

Tabel 20.

Data Rumah Ibadah per-Tanggal 02 Oktober 2019

No.	Daerah	Rumah Ibadah						Jumlah
		Masjid*)	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura**)	Vihara	Kelenteng	
1.	Banjarmasin	207	13	9	1	7	-	237
2.	Banjarbaru	99	8	4	1	-	-	112
3.	Banjar	358	-	-	10	-	-	368
4.	Tapin	133	3	1	9	-	-	146
5.	Hulu Sungai Selatan	125	6	-	42	-	-	173
6.	Hulu Sungai Tengah	252	2	-	57	-	-	311
7.	Hulu Sungai Utara	121	-	-	-	-	-	121
8.	Balangan	127	7	5	39	8	-	186
9.	Tabalong	229	26	8	2	-	-	265
10.	Barito Kuala	243	-	2	10	-	-	255
11.	Tanah Laut	276	18	15	6	1	-	316
12.	Tanah	254	4	34	88	-	-	380

	Bumbu							
13.	Kotabaru	291	3	6	12	10	-	322
Jumlah Total		2.715	90	84	277	26	-	3.192
Persentase		85,06%	2,82%	2,64%	8,68%	0,81%	0,00%	100%

*) Belum termasuk Langgar dan Musholla

**) Belum termasuk Sanggah

2. Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

Penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama. Jumlah penyuluh agama PNS dan Non PNS yang ada di provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 1.582 orang, terdiri dari penyuluh agama Islam PNS sebanyak 173 orang (*sumber: aplikasi SIMPEG*), penyuluh agama Kristen PNS sebanyak 1 orang (*sumber: Bimas Kristen*), penyuluh agama Katolik PNS sebanyak 4 orang (*sumber: Bimas Katolik*), penyuluh agama Hindu PNS sebanyak 3 orang (*sumber: Bimas Hindu*) dan penyuluh agama Buddha PNS belum ada (*sumber: Bimas Buddha*).

Sedangkan penyuluh agama Non PNS agama Islam berjumlah 1.250 orang (*sumber: Bidang Penerangan Agama Islam dan*

Pemberdayaan Zakat dan Wakaf), penyuluh agama Kristen 64 orang (*sumber: Bimas Kristen*), penyuluh agama Katolik 41 orang (*sumber: Bimas Katolik*), penyuluh agama Hindu sebanyak 20 orang (*sumber: Bimas Hindu*) dan penyuluh agama Buddha 26 orang (*sumber: Bimas Buddha*).

Tabel 21.
Data Penyuluh Agama

No	Penyuluh Agama	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	Islam	173	1.250	1.423
2.	Kristen	1	64	65
3.	Katolik	4	41	45
4.	Hindu	3	20	23
5.	Buddha	-	26	26
Jumlah Total		181	1.401	1.582

3. Jumlah KUA yang memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA mempunyai peran yang sangat strategis di wilayah kecamatan dituntut untuk mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan program-program dan kebijakan-kebijakan Kementerian Agama, baik dari tingkat Pusat, Kantor Wilayah maupun Kabupaten/Kota dalam rangka memberi pelayanan terbaik yang dapat memuaskan masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA pada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 adalah 151 KUA. Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp.3.000.000,- per bulan.

Tabel. 22

Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan
Se-Kalimantan Selatan

No.	Kota dan Kabupaten	Nama Kantor Urusan Agama
1.	Kota Banjarmasin	1. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara 2. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur 3. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah 4. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat 5. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
2.	Kota Banjarbaru	1. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara 2. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan 3. KUA Kecamatan Cempaka 4. KUA Kecamatan Landasan Ulin 5. KUA Kecamatan Liang Anggang
3.	Kabupaten Banjar	1. KUA Kecamatan Martapura Kota 2. KUA Kecamatan Astambul 3. KUA Kecamatan Pengaron 4. KUA Kecamatan Karang Intan 5. KUA Kecamatan Gambut 6. KUA Kecamatan Sungai Tabuk 7. KUA Kecamatan Kertak Hanyar 8. KUA Kecamatan Aluh-Aluh 9. KUA Kecamatan Simpang Empat 10. KUA Kecamatan Sungai Pinang 11. KUA Kecamatan Aranio 12. KUA Kecamatan Mataraman

		13. KUA Kecamatan Martapura Barat 14. KUA Kecamatan Martapura Timur 15. KUA Kecamatan Beruntung Baru 16. KUA Kecamatan Sambung Makmur 17. KUA Kecamatan Tatah Makmur 18. KUA Kecamatan Paramasan 19. KUA Kecamatan Telaga Bauntung
4.	Kabupaten Tapin	1. KUA Kecamatan Tapin Tengah 2. KUA Kecamatan Tapin Utara 3. KUA Kecamatan Selatan 4. KUA Kecamatan Binuang 5. KUA Kecamatan Candi Laras Selatan 6. KUA Kecamatan Candi Laras Utara 7. KUA Kecamatan Bakarangan 8. KUA Kecamatan Lok Paikat 9. KUA Kecamatan Piani 10. KUA Kecamatan Bungur 11. KUA Kecamatan Salam Babaris 12. KUA Kecamatan Hatungun
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. KUA Kecamatan Kandangan 2. KUA Kecamatan Simpur 3. KUA Kecamatan Angkinang 4. KUA Kecamatan Daha Utara 5. KUA Kecamatan Daha Selatan 6. KUA Kecamatan Daha Barat 7. KUA Kecamatan Padang Batung 8. KUA Kecamatan Sungai Raya 9. KUA Kecamatan Telaga Langsat 10. KUA Kecamatan Loksado 11. KUA Kecamatan Kalumpang
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1. KUA Kecamatan Barabai 2. KUA Kecamatan Batu Benawa 3. KUA Kecamatan Pandawan 4. KUA Kecamatan Batang Alai Selatan 5. KUA Kecamatan Batang Alai Utara 6. KUA Kecamatan Labuan Amas Selatan 7. KUA Kecamatan Labuan Amas Utara 8. KUA Kecamatan Haruyan 9. KUA Kecamatan Hantakan 10. KUA Kecamatan Batang Alai Timur 11. KUA Kecamatan Limpasu
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. KUA Kecamatan Amuntai Utara 2. KUA Kecamatan Amuntai Tengah 3. KUA Kecamatan Amuntai Selatan 4. KUA Kecamatan Sungai Pandan 5. KUA Kecamatan Danau Panggang

		6. KUA Kecamatan Babirik 7. KUA Kecamatan Banjarang 8. KUA Kecamatan Haur Gading 9. KUA Kecamatan Paminggir 10. KUA Kecamatan Sungai Tabukan
8.	Kabupaten Balangan	1. KUA Kecamatan Paringin 2. KUA Kecamatan Lampihong 3. KUA Kecamatan Batumandi 4. KUA Kecamatan Awayan 5. KUA Kecamatan Juai 6. KUA Kecamatan Halong 7. KUA Kecamatan Paringin Selatan 8. KUA Kecamatan Tebing Tinggi
9.	Kabupaten Tabalong	1. KUA Kecamatan Tanjung 2. KUA Kecamatan Tanta 3. KUA Kecamatan Haruai 4. KUA Kecamatan Muara Uya 5. KUA Kecamatan Kelua 6. KUA Kecamatan Banua Lawas 7. KUA Kecamatan Murung Pudak 8. KUA Kecamatan Upau 9. KUA Kecamatan Muara Harus 10. KUA Kecamatan Jaro 11. KUA Kecamatan Pugaan 12. KUA Kecamatan Bintang Ara
10.	Kabupaten Barito Kuala	1. KUA Kecamatan Alalak 2. KUA Kecamatan Mandastana 3. KUA Kecamatan Anjir Muara 4. KUA Kecamatan Anjir Pasar 5. KUA Kecamatan Tamban 6. KUA Kecamatan Tabunganen 7. KUA Kecamatan Bakumpai 8. KUA Kecamatan Cerbon 9. KUA Kecamatan Kuripan 10. KUA Kecamatan Belawang 11. KUA Kecamatan Rantau Badauh 12. KUA Kecamatan Tabukan 13. KUA Kecamatan Mekar Sari 14. KUA Kecamatan Barambai 15. KUA Kecamatan Marabahan 16. KUA Kecamatan Wanaraya 17. KUA Kecamatan Jejangkit
11.	Kabupaten Tanah Laut	1. KUA Kecamatan Pelaihari 2. KUA Kecamatan Bati-Bati 3. KUA Kecamatan Jorong 4. KUA Kecamatan Kurau

		5. KUA Kecamatan Takisung 6. KUA Kecamatan Kintap 7. KUA Kecamatan Panyipatan 8. KUA Kecamatan Tambang Ulang 9. KUA Kecamatan Batu Ampar 10. KUA Kecamatan Bajuin 11. KUA Kecamatan Bumi Makmur
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	1. KUA Kecamatan Batulicin 2. KUA Kecamatan Kusan Hilir 3. KUA Kecamatan Kusan Hulu 4. KUA Kecamatan Sungai Loban 5. KUA Kecamatan Satui 6. KUA Kecamatan Simpang Empat 7. KUA Kecamatan Mantewe 8. KUA Kecamatan Karang Bintang 9. KUA Kecamatan Angsana 10. KUA Kecamatan Kuranji
13.	Kabupaten Kotabaru	1. KUA Kecamatan Pulau Sembilan 2. KUA Kecamatan Pulau Laut Barat 3. KUA Kecamatan Pulau Laut Selatan 4. KUA Kecamatan Pulau Laut Timur 5. KUA Kecamatan Pulau Laut Utara 6. KUA Kecamatan Pulau Laut Tengah 7. KUA Kecamatan Pulau Laut Kepulauan 8. KUA Kecamatan Pulau Sebak 9. KUA Kecamatan Kelumpang Hilir 10. KUA Kecamatan Kelumpang Hulu 11. KUA Kecamatan Kelumpang Barat 12. KUA Kecamatan Kelumpang Selatan 13. KUA Kecamatan Kelumpang Utara 14. KUA Kecamatan Kelumpang Tengah 15. KUA Kecamatan Hampang 16. KUA Kecamatan Sungai Durian 17. KUA Kecamatan Pamukan Selatan 18. KUA Kecamatan Pamukan Utara 19. KUA Kecamatan Pamukan Barat 20. KUA Kecamatan Sampanahan
Jumlah		151 Lembaga

4. Jumlah Penghulu yang memenuhi Kompetensi

Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, terjadi perubahan mengenai status jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang semula merupakan jabatan struktural berubah menjadi jabatan fungsional. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh Penghulu dengan tugas tambahan.

Tindak lanjut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 melahirkan Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Kegiatan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing terhadap jabatan Penghulu pada Bulan Agustus 2017. Sehingga pada Tahun 2019 data terakhir jabatan Fungsional Penghulu di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 185 orang Penghulu (*sumber: Aplikasi SIMPEG Kemenag*).

Tabel. 23
Data Penghulu pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten dan Kota

No.	Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Kota Banjarmasin	18	
2.	Kota Banjarbaru	8	
3.	Kabupaten Banjar	23	
4.	Kabupaten Tapin	13	
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	10	
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	12	
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	16	
8.	Kabupaten Balangan	11	
9.	Kabupaten Tabalong	14	
10.	Kabupaten Barito Kuala	19	
11.	Kabupaten Tanah Laut	12	
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	9	
13.	Kabupaten Kotabaru	20	
	Jumlah Total Penghulu	185	

5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi.

Hasil Survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menyimpulkan, Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Di Indonesia (IKPHDI) tahun 2019 mencapai 88.44 persen, terkategori sangat memuaskan. IKPHDI ini meliputi kepuasan pelayanan jamaah haji dari fase pendaftaran, keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.

1. Hasil survei untuk indeks pendaftaran haji mencapai 88,97 dengan pelayanan pendaftaran haji di Kemenag Kab/Kota mencapai 88,97,
2. Indeks keberangkatan 88,26, dengan pelayanan pelunasan BPIH di kemenag kab/kota 88,9, pelayanan manasik haji Kab/Kota 88,26 dan pelayanan PPIH di asrama haji 87, 6.
3. Indeks kepulangan mencapai 88,08 dengan pelayanan petugas kloter selama di tanah air 88,08 dan pelayanan pengangkutan udara pulang-pergi 88,5.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu kuantitatif dengan metode survei *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 212.732 jamaah yang terdiri dari 13 embarkasi asrama haji dengan sampel 780 responden.

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian sasaran strategis ketiga, yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan dengan 5 (lima) indikator, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 24.

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.

Sasaran Strategis 3.			
Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi Standar	39 lembaga	35 lembaga	89,74 %

Laporan Kinerja Kanwil Kemenag. Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2019

2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi Kompetensi	94 orang	181 orang	192,55 %
3. Jumlah KUA yang memenuhi Standar	3 lembaga	3 lembaga	100,00 %
4. Jumlah Penghulu yang memenuhi Kompetensi	159 orang	185 orang	116,35 %
5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi	85,00 %	88,44 %	104,04 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.			120,53 %

Berdasarkan perhitungan target - realisasi terhadap pelaksanaan capaian Sasaran Strategis 3 dengan capaian Outcome dapat dinilai “sangat baik” yaitu berjumlah 120,53 %.

b. Sasaran Strategis Bidang Pendidikan

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan.

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian sasaran strategis keempat, yaitu : Meningkatnya akses layanan pendidikan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 25.

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.

Sasaran Strategis 4.			
Meningkatnya akses layanan pendidikan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. APK RA	8,66 %	4,85 %	56,00 %
2. APK MI/Ula	13,54 %	16,59 %	122,53 %

3. APM MI/Ula	11,15 %	14,82 %	132,91 %
4. APK MTs/Wustha	22,50 %	36,14 %	160,62 %
5. APM MTs/Wustha	18,36 %	28,39 %	154,63 %
6. APK MA/Ulya	9,41 %	17,36 %	184,48 %
7. APM MA/Ulya	6,98 %	13,93 %	199,57 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.			144,39 %

1. APK RA

APK RA pada rentang usia 3-6 tahun belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 8,66% dengan capaian hanya sebesar 4,85% atau capaian kinerja hanya sebesar 56.00%, hal ini dapat dimaklumi karena belum optimalnya dukungan kegiatan maupun bantuan yang berpengaruh pada perluasan akses masyarakat ke RA dibandingkan dengan PAUD/TK di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki program yang intens dalam pengembangan mutu PAUD/TK.

Untuk tahun 2019 ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasi dana BOP RA bagi 15.784 Murid RA se-Kalimantan Selatan, sedangkan Program pembangunan/rehabilitasi dan pengembangan prasarana RA belum teralokasi.

2. APK MI/Ula

Realisasi APK SMI/Ula 16,59% capaian ini telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 13,54% di tahun

2019, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan dari capaian tersebut sebesar 122,53%, dengan capaian maksimal pada APK jenjang MI/Ula ini menunjukkan kinerja yang baik pada kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam dan Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah serta meningkatnya manajemen pelayanan pada jenjang MI/Ula di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 435.600 anak, jumlah siswa MI/Ula sebanyak 72.257 siswa, walaupun terjadi penurunan sebesar 0,08% dari Tahun 2018, APK MI/Ula sebesar 16,59% telah melebihi target APK tahun 2019.

3. APM MI/Ula

Sama halnya dengan realisasi pencapaian APK pada APM MI/Ula juga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap capaian kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 132,91%, pada tahun 2019 APM MI/Ula ditarget sebesar 11,15% dari target tersebut telah terealisasi sebesar 14,82%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, capaian tahun 2019 mengalami koreksi 1,49%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 11,15%, maka capaian Indikator kinerja Tahun 2019 telah terlampaui.

Pembenahan pemenuhan akses pendidikan dasar jenjang MI/Ula di Provinsi Kalimantan Selatan berdampak langsung terhadap kenaikan pencapaian baik APK maupun APM, beberapa program yang dijalankan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam upaya meningkatkan APK dan APM diantaranya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Pemberian BOS, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI/Ula, rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi. Untuk jenjang MI/Ula, pada tahun 2019 telah disalurkan bantuan melalui PIP kepada 9.463 siswa MI, adapun pembangunan/rehabilitasi MI yang berhasil direalisasikan sebanyak 19 MI.

4. APK MTs/Wustha

Realisasi capaian APK MTs/Wustha sebesar 36,14% telah melampaui target yang ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 22,50%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 mencapai 160,62% dan mengalami kenaikan sebesar 2,07% dari tahun 2018.

Untuk tahun 2017 jumlah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 214.500 anak, sedangkan jumlah siswa MTs/Wustha sebanyak 77.528 siswa. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan BOS dan pelaksanaan PIP yang tepat sasaran merupakan salah

satu langkah yang telah ditempuh untuk mendorong anak-anak usia sekolah yang termarginalisasi agar bersekolah kembali. Program tersebut merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan akses dan relevansi masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah untuk beberapa Kabupaten. Pembinaan dan pengawasan terhadap penerima KIP oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dari keluarga miskin memperoleh manfaat dari PIP, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran dana PIP dari yang berhak, sehingga siswa yang benar-benar dari keluarga miskin yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dapat menerima bantuan.

5. APM MTs/Wustha

Pada capaian APM MTs/Wustha juga terjadi kenaikan yang signifikan terhadap capaian kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 154,63%, pada tahun 2019 APM MTs/Wustha ditarget sebesar 18,36% dari target tersebut telah terealisasi sebesar 28,39%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, capaian tahun 2019 mengalami koreksi 2,19%. Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode renstra yaitu sebesar 118,36%, maka capaian Indikator kinerja Tahun 2019 telah terlampaui.

Pembenahan pemenuhan akses pendidikan dasar jenjang MTs/Wustha di Provinsi Kalimantan Selatan sangat berpengaruh terhadap kenaikan pencapaian baik APM MTs/Wustha, beberapa program yang dijalankan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam upaya meningkatkan APK dan APM diantaranya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Pemberian BOS, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MI/Ula, rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi. Untuk jenjang MTs/Wustha, pada tahun 2019 telah disalurkan bantuan melalui PIP kepada 7.215 siswa MTs, adapun pembangunan/rehabilitasi MTs yang berhasil direalisasikan sebanyak 26 MTs se-Kalimantan Selatan.

6. APK MA/Ulya

Realisasi APK MA/Ulya pada periode Januari - Desember 2019, telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target APK MA/Ulya ditargetkan sebesar 9,41%, dari target tersebut baru terealisasi sebesar 17,36%, dan mengalami peningkatan sebesar 3,41% dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 sebesar 9,41%, maka capaian kinerja telah terlampaui dengan capaian sebesar 184,48%.

7. APM MA/Ulya

Begitu juga dengan APM MA/Ulya, telah terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 6,98% dengan capaian sebesar 13,93%, hal ini menjadikan capaian kinerja untuk Indikator Kinerja APM MA/Ulya menjadi 199,57%.

Peningkatan APK maupun APM jenjang MA/Wustha tidak terlepas dari keberhasilan Program Nasional yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang mulai difokuskan secara intensif sejak Tahun 2015 diantaranya Program Indonesia Pintar, Pemberian BOS, pembangunan madrasah baru, Pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, dan pemberian beasiswa, Program Indonesia Pintar yang dijalankan pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan sekolah menengah, selain itu PIP juga berhasil meningkatkan angka melanjutkan siswa MTs ke jenjang lebih tinggi.

Untuk terus meningkatkan APK MA/Ulya dibutuhkan ketersediaan sekolah sampai dengan tingkat kecamatan. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berupaya membantu meningkatkan ketersediaan ruang kelas yang representatif di setiap kabupaten dan Kecamatan, pada tahun 2019 ada sebanyak 17 MA se-Kalimantan Selatan yang diberikan bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung pendidikan

madrasah. PIP menjadi salah satu andalan untuk terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Selain itu PIP diharapkan dapat mencegah peserta didik dari putus sekolah (DO) dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penerima PIP diprioritaskan kepada: Peserta didik pemegang KIP, Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan KKS, Siswa yatim/piatu/yatim piatu dari sekolah/panti asuhan/panti sosial lainnya, Siswa terdampak bencana alam, Siswa drop out yang diharapkan bisa kembali bersekolah, Siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terancam putus sekolah, Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga Pemasyarakatan, dan memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah. Perlu adanya sinergi yang lebih intensif antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendataan siswa dan penduduk sehingga permasalahan data PIP ini dapat teratasi dan juga ketepatan sasaran siswa penerima PIP ini bisa lebih akurat.

2. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun hasil capaian pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian sasaran strategis kelima, yaitu : Meningkatnya mutu

pendidikan agama dan keagamaan dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 26.

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.

Sasaran Strategis 5.			
Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Rerata nilai ujian sekolah MTs	50,00	50,42	100,84 %
2. Rerata nilai ujian sekolah MA	55,00	51,48	93,60 %
3. Indeks Integritas Siswa	85,00%	96,45 %	113,47 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.			102,63 %

1. Rerata nilai ujian sekolah MTs

Rerata nilai ujian sekolah pada MTs mengalami peningkatan, dimana hasil pengukuran realisasi capaian kinerja mencapai 100,84%, yang disebabkan karena Perubahan dari UNKP ke UNBK secara masif meningkatkan integritas pelaksanaan UN dan meningkatkan keandalan hasil UN. Madrasah yang selama ini mempunyai integritas tinggi cenderung tidak mengalami perubahan capaian, bahkan meningkat. Sementara sekolah dengan IIUN rendah di tahun sebelumnya mengalami kenaikan capaian setelah beralih ke UNBK atau meningkat IIUNnya. Hasil UN yang murni bila digunakan untuk

perbaikan pembelajaran menunjukkan peningkatan capaian secara nyata pada capaian siswa madrasah.

Beberapa program perbaikan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 antara lain: 1) pemerataan kualitas pendidikan, melalui peningkatan profesionalisme guru dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan; 2) mendorong peningkatan akses pada layanan pendidikan 12 tahun, serta menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang kaya dan yang miskin; 3) pemenuhan kesejahteraan guru khususnya di daerah-daerah tertinggal melalui Tunjangan Khusus.

Selain mengalami koreksi positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019, maka capaian realisasi untuk rerata ujian MTs Tahun 2019 tersebut meningkat dengan selisih sebesar 0,42 poin, tercatat rata-rata UN MTs pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 50,00%.

2. Rerata nilai ujian sekolah MA

Salah satu Indikator Kinerja yang masih belum tercapai secara maksimal adalah Rerata nilai ujian sekolah pada MA Tahun 2019, dimana hasil pengukuran realisasi capaian kinerja mencapai 93,60 %, dengan realisasi untuk rerata ujian MA yang ditargetkan sebesar 55,00 % memiliki kekurangan selisih sebesar 3,52 point atau sebesar 91,48 %, penurunan capaian tersebut

terjadi secara merata lintas semua jenis Program Studi yang diikuti oleh sisa Madrasah Aliyah.

Meskipun rerata nilai ujian MA mengalami penurunan namun kita patut bersyukur Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tingkat MA sederajat cenderung meningkat. Belum tercapainya target pada Rerata nilai ujian pada MA dikarenakan berbagai faktor diantaranya: 1) kemungkinan tidak digunakannya hasil UN dalam menentukan kelulusan siswa berakibat keseriusan siswa dan guru dalam menyiapkan diri menghadapi UN juga berkurang; 2) bentuk kisi-kisi UN tahun 2017 yang tidak lagi berupa indikator soal yang rinci. Dengan kisi-kisi yang tidak rinci maka bentuk soal ujian tidak lagi bisa ditebak oleh bimbingan belajar atau latihan soal intensif (drilling) yang cenderung menyempitkan kurikulum, dan 3) kemungkinan juga dalam UN 2019 jumlah soal dengan ketrampilan berpikir order tinggi (HOTS) juga ditingkatkan hingga mencapai 10%. Perubahan tersebut juga merupakan bagian dari reformasi penilaian yang terus dilakukan untuk lebih mendorong siswa dan guru melakukan pembelajaran yang sejalan dengan kebutuhan kompetensi abad 21, dan masih belum diterapkan secara optimal.

Upaya pembenahan terus dilakukan dengan menggalakkan kegiatan pembinaan dan pengembangan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui Program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kementerian Agama, Bimtek Kurikulum 2013, Workshop Pendampingan Kurikulum 2013, diusahakan lebih awal direalisasikan agar persiapan ujian lebih matang.

3. Indeks Integritas Siswa

Mulai Tahun 2018, terjadi revisi Indikator Kinerja Utama pada renstra Kementerian Agama dan hal ini berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama di level Provinsi, dengan adanya revisi tersebut ada beberapa indikator yang dihilangkan dan terdapat indikator baru yang dimunculkan, salah satu indikator baru yang dimaksud adalah Indeks integritas siswa madrasah yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat integritas dan kejujuran siswa di madrasah.

Pada tahun 2019, pengukuran Indeks Integritas Siswa dilaksanakan dengan melihat perkembangan pelaksanaan ujian nasional. Indeks integritas ujian nasional menggambarkan capaian integritas sekolah-sekolah yang melaksanakan UN berbasis Kertas Pensil (UNKP), capaian nilai integritas ujian nasional dikategorikan tinggi apabila mencapai nilai 70 s.d 100. Berdasarkan tabel capaian integritas, hampir pada semua jenjang capaian integritas ujian nasional tahun 2019 sudah mencapai kategori tinggi.

Peningkatan capaian indeks integritas siswa madrasah Tahun 2019 sebesar 96,45% telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 85.00% hal ini dipengaruhi adanya transformasi masif mode penyelenggaraan ujian dari kertas dan pensil menjadi berbasis komputer, tersosialisasinya Kampanye Ujian nasional yang mengedepankan kejujuran tidak semata prestasi, dan meningkatnya kesadaran dan dukungan pemerintah daerah dalam lembaga berkepentingan dalam mendorong sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangannya untuk melaksanakan UNBK, sehingga dengan sendirinya peningkatan tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja menjadi 113,47% pada Tahun 2019.

Dari uraian analisis capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 27.
Rincian Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	113,45 %
2.	Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama	98,33 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	120,53 %
4.	Meningkatnya akses layanan pendidikan	144,39 %
5.	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	102,63 %

Jumlah Capaian Kinerja	115,86 %
-------------------------------	-----------------

Dari tabel diatas menunjukkan perhitungan target - realisasi terhadap pelaksanaan capaian pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan capaian Outcome dapat dinilai **“sangat baik”** yaitu berjumlah 115,86 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu mencapai 98,22 %.

B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Siklus penyusunan RKA-K/L dimulai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan Penetapan ini, Kementerian/Lembaga mengevaluasi baseline (angka dasar) dan mengajukan inisiatif baru. Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan pagu Anggaran Kementerian/Lembaga untuk penyusunan RKA-K/L. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan pagu

Anggaran yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Agama.

DIPA Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pagu Awal Alokasi Anggaran adalah sebesar Rp. 1.305.045.333.000,- (satu triliun tiga ratus lima miliar empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang kemudian mengalami revisi penambahan anggaran sehingga menjadi Rp. 1.394.653.181.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28.
Laporan Realisasi Anggaran Per-Eselon
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

No	Ruang Lingkup Satker	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	%
1.	Sekretaris Jenderal	Rp. 53.974.447.000	Rp. 51.978.428.186	Rp. 1.996.018.814	96.30%
2.	Pendidikan Islam	Rp. 1.154.769.812.000	Rp. 1.144.001.743.892	Rp. 10.768.068.108	99.06 %
3.	Bimas Islam	Rp. 144.918.006.000	Rp. 135.007.644.795	Rp. 9.910.361.205	93.16 %
4.	Bimas Kristen	Rp. 5.050.124.000	Rp. 3.817.384.575	Rp. 1.232.739.425	75.58 %
5.	Bimas Katolik	Rp. 6.208.507.000	Rp. 5.612.682.997	Rp. 595.824.003	90.40 %
6.	Bimas Hindu	Rp. 5.411.822.000	Rp. 4.818.876.653	Rp. 592.945.347	89.04 %
7.	Bimas Buddha	Rp. 3.905.154.000	Rp. 3.849.126.182	Rp. 56.027.818	98.56 %
8.	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 20.415.309.000	Rp. 19.128.004.558	Rp. 1.287.304.442	93.69 %
Jumlah		Rp. 1.394.653.181.000	Rp. 1.368.213.891.838	Rp. 26.439.289.162	91,97 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

sebesar 91,97 % dari target anggaran Rp. 1.394.653.181.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.368.213.891.838 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga bersisa atau tidak terealisasi sebesar Rp. 26.439.289.162 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah), atau mencapai target sebesar 91,97 %.

Adapun rincian uraian hasil capaian kinerja dan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 29.
Rincian Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Tahun 2019

No	Realisasi	Persentase (%)
1.	Realisasi Capaian Kinerja	115,86 %
2.	Realisasi Capaian Keuangan	91,97 %
Jumlah		103,91 %

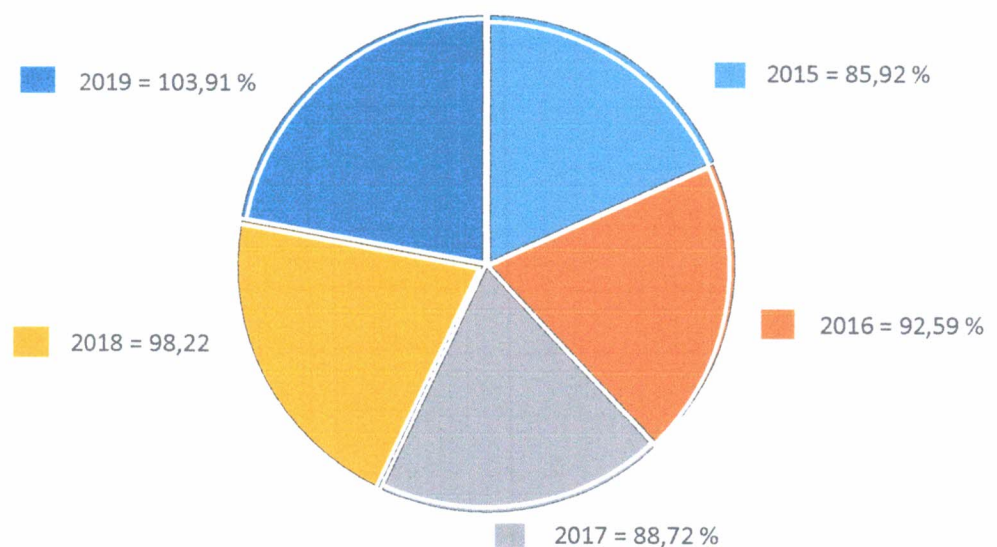
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan realisasi capaian kinerja tahun 2019 pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai **sangat baik**, yaitu antara

realisasi capaian kinerja sebesar 115,86 % dan realisasi capaian keuangan sebesar 91,97 % sehingga jika digabungkan berjumlah 103,91 % **atau berstatus “SANGAT BAIK”** dan terjadi kenaikan sebesar 5,69 % dari nilai kinerja tahun 2018 yaitu 98,22 %.

Tabel 30.
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

No	Realisasi	Persentase Capaian Laporan Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Capaian Kinerja	84,96 %	94,36 %	90,73 %	104,57 %	115,86 %
2.	Capaian Keuangan	86,89 %	90,83 %	86,72 %	91,88 %	91,97 %
Jumlah		85,92 %	92,59 %	88,72 %	98,22 %	103,91 %

DIAGRAM CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini sebagai wujud laporan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kepada Menteri Agama RI. Yang telah memberi tugas dan amanah untuk memimpin Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana strategis (renstra) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Seiringnya berjalannya waktu Tahun 2019 ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga Sasaran Strategis yang semula berjumlah 16 (enam belas) menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis, yaitu sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama; (2) Meningkatkan harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan; (4) Meningkatkan akses layanan pendidikan; (5) Meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan

Pelaksanaan capaian kinerja sasaran strategis pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dari 5 (lima) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai capaian kinerja 115,86 % dan capaian realisasi keuangan mencapai 91,97 %. Sehingga secara mandiri apabila digabungkan antara realisasi capaian

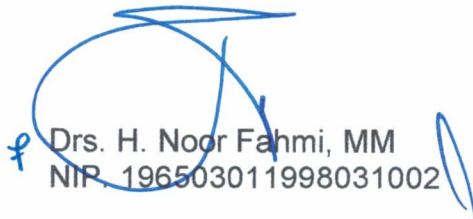
kinerja dan realisasi capaian keuangan sebesar 103,91 % dengan status **“sangat baik”**.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 merupakan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak intern yaitu para pejabat struktural dan fungsional serta karyawan-karyawati Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak eksternal atau Instansi Pemerintah sebagai mitra kerja guna mewujudkan dan mendukung pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 s.d 2019. Namun hasil yang diperoleh tersebut pada tahun 2019 ini perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya yaitu Renstra Tahun 2020 s.d 2024, sehingga menghasilkan capaian kinerja yang sangat membanggakan.

Demikian Laporan Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 ini disusun sebagai tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.

Banjarmasin, Februari 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan,


Drs. H. Noor Fahmi, MM
NIP. 196503011998031002

Dokumentasi Tahun 2019



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Doa Pada Acara Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, Di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Menteri Agama Jend. (Purn TNI) Fachrul Razi Dan Wamen H. Zainut Tauhid Sa'adi Di Auditorium H.M. Rasjidi Kemenag RI Jakarta Pusat



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Didampingi Kepala MAN IC Beserta Ketua Tim TP4D Melakukan Peninjauan Pembangunan Proyek SBSN MAN IC Tanah Laut.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Pembacaan Doa Pada Acara Peringatan Hari Pahlawan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, Di Halaman Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Pembacaan Doa Pada Acara Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2019 Bersama Wakil Presiden RI K.H Ma' Ruf Amin Dan Menteri Sosial RI, Di Halaman Kantor Setda Prov. Kalsel Kota Banjarbaru



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Menjadi Panelis (Narasumber) Bersama Kasubdit Pembinaan Petugas Haji Ditjen PHU Kemenag RI H. Ahmad Jauhari Dan Anggota Komisi VIII DPR RI H. Syaiful Rasyid Pada Kegiatan JAMARAH (JAGONG MASALAH UmRAH Dan Haji) Di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Doa Pada Acara Peringatan Hari Pers Nasional Bersama Bapak Presiden RI Joko Widodo Tahun 2020, Di Halaman Kantor Setda Prov. Kalsel.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Pembacaan Doa Bersama Lintas Agama Himbauan Pilkada Damai Sekaligus Malam Pisah Sambut 2019-2020, Di Halaman Siring Bekantan Banjarmasin.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memberikan Sambutan Pada Acara Peringatan Natal Bersama TNI, POLRI, ASN Dan Umat Kristiani Prov Kalsel 2019, Di Grand Palace Restaurant & Grand Cafe Banjarmasin



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Menerima Tim BNN Kalsel Dan Melakukan Tes Urine Dalam Rangka HAB Kemenag Ke-74 Tahun 2020



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memberikan Arahan Sekaligus Menutup Acara Dialog Lintas Agama Dengan Seluruh Pemuka Agama Se- Kab. Tanah Laut, Di Aula Kankemenag Kab. Tanah Laut



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Beserta Isteri Tiba Di Bandara Hasanuddin Makassar. Rabu (09/10/19) Dalam Rangka Menghadiri Acara Pembukaan Pentas PAI Nasional IX Tahun 2019 Di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Beserta Ketua DWP Hj. Siti Mariani Noor Fahmi Hadiri Pembukaan Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional Ke-III Yang Dibuka Oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Di Hotel Shangrila Surabaya.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Beserta Ketua DWP Kanwil Hj. Siti Mariani Noor Fahmi Hadiri Pembukaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Ke-VIII Tahun 2019 Di Ballroom Hotel Novotel Manado Sulawesi Utara.



Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Menyampaikan Sambutan Dan Menerima Secara Resmi Kedatangan Jamaah Haji Kloter 18 Dari Kalteng Di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Menjadi Narasumber Pada Acara Kuliah Umum Pengembangan Ekonomi Pesantren Mengenai Peluang Dan Bisnis Dalam Memperdayakan Ekonomi Pondok Pesantren, Di Aula Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Doa Pada Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2019-2024, Di Ruang Rapat DPRD Prov. Kalsel



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H Noor Fahmi Memimpin Doa Pada Acara Puncak Haornas 2019 Di Siring Sungai Menara Pandang Banjarmasin.



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Menerima Secara Resmi Kedatangan Jamaah Haji Kloter 6 Dari HSU Dan Banjar Di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin



Ka. Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi Hadiri Acara Malam Penganugerahan BAZNAS AWARD TAHUN 2019, Di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama RI Jakarta Pusat

Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Noor Fahmi, MM
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, MA.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis
Setiawan, MA.

Pihak Pertama,

Drs. H. Noor Fahmi, MM

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

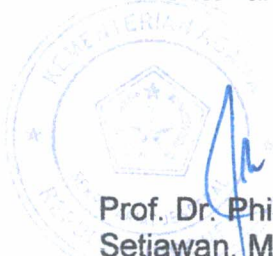
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	1. Jumlah umat beragama yang aktif pada Rumah Ibadah 2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	3.000.000 3.200
Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama	1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi	- 75,00%
Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar	39 buah
	2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi	94 orang
	3. Jumlah KUA yang memenuhi standar	3 lembaga
	4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi	159 orang
	5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi	85,00%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	1. APK RA	8,66 %
	2. APK MI/Ula	13,54 %
	3. APK MTs/Wustha	11,15 %
	4. APK MA/Ulya	22,50 %
	5. APM MI/Ula	18,36 %
	6. APM MTs/Wustha	9,41 %
	7. APM MA/Ulya	6,98 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	1. Rerata nilai ujian sekolah MTs	50,00
	2. Rerata nilai ujian sekolah MA	55,00
	3. Indeks Integritas Siswa	85,00%

Program	Anggaran
1. Sekretariat Jenderal	Rp. 49.497.917.000
2. Bimbingan Masyarakat Islam	Rp. 123.264.428.000
3. Pendidikan Islam	Rp. 1.096.459.195.000
4. Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp. 4.521.944.000
5. Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp. 6.207.129.000
6. Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp. 5.244.631.000
7. Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp. 3.588.658.000
8. Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp. 16.261.431.000
Jumlah Seluruhnya	Rp. 1.305.045.333.000

Banjarmasin, 2 Januari 2019

Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI



Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis
Setiawan, MA.
NIP. 196911101994031005

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. H. Noor Fahmi, MM
NIP. 196503011998031002

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	1. Jumlah umat beragama yang aktif pada Rumah Ibadah	3.000.000	2.443.210	81,44 %
	2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	3.200	4.655	145,46 %
Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama	1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	-	-	100 %
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi	75,00 %	72,50 %	96,66 %
Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar	39 lembaga	35 lembaga	89,74 %
	2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi	94 orang	181 orang	192,55 %
	3. Jumlah KUA yang memenuhi standar	3 lembaga	3 lembaga	100 %
	4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi	159 orang	185 orang	116,35 %
	5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi	85,00%	88,44 %	104,04 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses layanan pendidikan	1. APK RA	8,66 %	4,85 %	56,00 %
	2. APK MI/Ula	13,54 %	16,59 %	122,53 %
	3. APM MI/Ula	11,15 %	14,82 %	132,91 %
	4. APK MTs/Wustha	22,50 %	36,14 %	160,62 %
	5. APM MTs/Wustha	18,36 %	28,39 %	154,63 %
	6. APK MA/Ulya	9,41 %	17,36 %	184,48 %
	7. APM MA/Ulya	6,98 %	13,93 %	199,57 %
Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	1. Rerata nilai ujian sekolah MTs	50,00	50,42	100,84 %
	2. Rerata nilai ujian sekolah MA	55,00	51,48	93,60 %
	3. Indeks Integritas Siswa	85,00 %	96,45 %	113,47 %

Jumlah Anggaran Tahun 2019

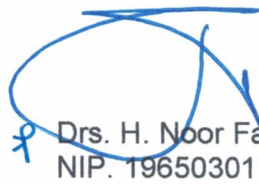
Rp. 1.394.653.181.000

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019

Rp. 1.368.213.891.838

Banjarmasin, Februari 2020

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan


Drs. H. Noor Fahmi, MM
NIP. 196503011998031002